



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Meimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berkewajiban Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 YOGYAKARTA TAHUN 2025

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	Evidence		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi	√													SK RB		
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	2. Kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi	√															Dokumen Deklarasi PerTanggal 17 Januari 2025
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Sosialisasi secara terus menerus diberbagai media dan rencana aksi	1. Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang mudah diakses stakeholder dan internal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Banner RB dan Banner di medsos
			2 Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Yogyakarta	2 Meningkatkan pemahaman tentang Reformasi Birokrasi						√										Pelaksanaan sosialisasi SK RB, Und Dafdir Dokumentasi
		2 Sosialisasi nilai nilai untuk menegakan integritas penyelenggara pemilu dan ASN	3 Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik dan pelanggaran pemilu								√								Kegiatan Sosialisasi mengundang Narasumber dari KPU DIY Via Zoom	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	Evidence	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			3 Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja	4 Prosentase dan laporan Pakta integritas, LHKPN, LHKASN	√														Laporan seluruh pegawai sudah menandatangani pakta integritas, semua pegawai sudah melaporkan LHKPN dan LHKASN
				5 Dokumen Laporan Benturan Kepentingan				√	√	√	√	√	√	√	√	√			Dokumen Laporan Benturan Kepentingan
			4 Internalisasi nilai nilai dasar budaya kerja positif di unit kerja	1 tersedia media sosialisasi nilai nilai dasar budaya kerja positif di lingkungan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			SK Budaya Kerja, Banner/Spanduk
			5 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	1 Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun								√							Piagam Penghargaan, BA
			6 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak eksternal	1 Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			Banner RB dan Banner di medsos
		3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU	Melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB dan rencana aksi agen perubahan	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi dan agen perubahan di lingkungan kerja								√						√	Instrumen monev dan hasil monev
			Melakukan evaluasi pelaksanaan RB dan Agen Perubahan melalui LKE Unit secara mandiri	Terisnya lembar kerja evaluasi unit														√	Lembar Kerja Evaluasi

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	Evidence	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan / produk hukum satuan kerja	1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Adanya Paraf Koordinasi pada setiap pembuatan SK	
			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	2. Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	√								√						
		2 Pengelolaan JDIH	Pengelolaan JDIH	Updatenya JDIH satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Pembuatan Abstrak, Bukti Upload di JDIH
		3 Sistem Pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum.	Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP.				√											
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Reorganisasi	1. Klasterisasi Sekretariat	1. Terisinya jabatan sesuai Klaster			√											Usulan JFU dan foto Struktur Organisasi	
			2. Jumlah Pegawai ASN	2. Terpenuhinya kebutuhan jumlah														√	Laporan Data Pegawai
4	Penataan Tata laksana	1 Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1. Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan	1. Operator mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)					√									Bukti mengikuti Diklat	
			2. Pengisian berbagai aplikasi	2. 100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Bukti pengisian Aplikasi (Srikandi, Sakti)

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	Evidence	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		2 Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja	√													SK PPID	
			2. Pelaksanaan Kegiatan PPID	2. Pemenuhan permintaan terhadap informasi dan dokumentasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rekap Permohonan Informasi, Laporan PPID
			3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	3. Tersedianya laporan pelaksanaan PPID	√														
		3 Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU	1. Penerapan sistem arsip	1. Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dokumentasi Penataan Arsip
			2. Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	2. Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah				√	√										Surat Audiensi, Pelaksanaan Audiensi, BA Penyerahan Arsip
		4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU	1. Penyusunan standart operasional [SOP]	1. SOP seluruh unit kerja telah tersusun	√			√											Daftar SOP
			2. Pelaksanaan SOP	2. SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Und Rapat Evaluasi SOP, Dafdir, Dokumentasi
		5 Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU	Evaluasi pelaksanaan SOP	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP				√											Und Rapat Evaluasi SOP, Dafdir, Dokumentasi, Dokumen Evaluasi SOP (Review dan Penerapan SOP)

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	Evidence			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
5.	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Perencanaan Kebutuhan	1. Pengisian jabatan struktural di Satker sesuai SOTK	1. Tersedianya jabatan struktural di Satker sesuai SOTK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Surat Pelaksanaan Melaksanakan Tugas			
			2. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	2. Tercapainya jumlah pegawai 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Dokumentasi Struktur Organisasi	
		2 Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Dokumentasi Struktur Organisasi	
		3 Penilaian kinerja pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP	√			√				√				√				SKP Pegawai ASN	
		4 Reward and punishment berbasis kinerja	1 Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja	1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan										√							SK Reward & Punishment, SK dan BA Pegawai Teladan
				2. Tersedianya Laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai teladan											√						
				2 Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	3. Tersedianya laporan penegakan disiplin																Laporan Kinerja Pegawai di SPIP
		7. Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online	100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			Laporan Kinerja Pegawai di SPIP		

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	Evidence	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		8. Sistem pengkaderan pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan knowledge sharing bagi peserta diklat dan bimbingan teknis	Laporan kegiatan knowledge sharing di lingkungan satuan kerja					√			√			√			Undangan, Dafdir, Materi, Notulensi, Dokumentasi	
6	Penguatan Akuntabilitas	1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu	√													PK, RKT	
		2. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu	√														Laporan LAKIP, LKJ 2024
		3. Peningkatan kompetensi Akuntabilitas	Pelatihan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan / bimbingan teknis/ pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat												√			Undangan Pelatihan, Materi
7	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Sosialisasi dan internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi dan gratifikasi dan benturan di lingkungan kerja						√								SK Benturan Kepentingan, und, dafdir, notulensi, dokumentasi	
		2 Evaluasi dan monitoring pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan	Melakukan evaluasi dan monitoring pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan	Tersedianya laporan evaluasi dan monitoring pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan							√	√	√	√	√	√			Laporan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan
		2. Pembangunan sistem pengawasan intern	1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP	√														SK Tim SPIP
			2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi :	2. Terlaksananya kegiatan SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	Evidence
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			a. Menetapkan lingkungan pengendalian b. Melakukan penilaian resiko c. Melakukan kegiatan pengendalian d. Melakukan informasi dan komunikasi pengawasan , dan e. Melakukan pemantauan pengendalian intern	3. Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Kartu Kendali SPIP, Bukti Laporan E-SPIP, Laporan tahunan SPIP
		3. Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	1. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Kotak Dumas, Dumas Medsos, SK Dumas, Ruang Pelayanan Dumas, Formulir Pengaduan Dumas
			2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	2. Tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Laporan Dumas
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi dan sistem pengaduan masyarakat	3 Tersedianya laporan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Laporan Monitoring dan Evaluasi dan Sistem Pengaduan Masyarakat
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan pelayanan satu atap KPU	1. Kebijakan standar pelayanan	1. Tersedianya standar pelayanan	√													Dokumen SP
			2. Penyusunan maklumat pelayanan	2. Tersedianya maklumat pelayanan	√													Dokumen Maklumat Pelayanan

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	Evidence	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			3. Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan	3. Tersedianya SOP pelayanan	√													Dokumen SOP Pelayanan	
			4. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	4. Pelayanan Terpadu dalam satu tempat	√													Foto Sarpras Pelayanan	
	2 Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih	1. Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu	1. Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Dokumentasi RPP Taman Pintar	
		2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2. Terwujudnya kegiatan melibatkan stakeholder	2. Terwujudnya kegiatan melibatkan stakeholder				√					√				√		Undangan, Foto Kegiatan
	3. Kegiatan penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	Pengelolaan pengaduan masyarakat	1. Dibentuknya Help Desk Pengaduan masyarakat	1. Dibentuknya Help Desk Pengaduan masyarakat	√													Pengaduan di Website, Foto WA Helpdesk, Kotak Pengaduan	
2. Tersedianya SOP pelayanan pengaduan			2. Tersedianya SOP pelayanan pengaduan	2. Tersedianya SOP pelayanan pengaduan	√														SOP Pengaduan
3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk			3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk	3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Adanya kebijakan di masing - masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan / memuaskan	Adanya kebijakan di masing - masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan / memuaskan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		SK reward & punishment	
	5 Evaluasi dan monitoring kualitas pelayanan publik	Melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelayanan publik di Satuan kerja	Tersedianya laporan Pelayanan Publik di Satuan Kerja	Tersedianya laporan Pelayanan Publik di Satuan Kerja				√	√	√	√	√	√	√	√	√		Dokumen Laporan Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Publik di Satker	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	Evidence	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat															Laporan SKM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA